

**FACTORS INFLUENCING THE LEVEL OF DISCLOSURE OF FINANCIAL
REPORTS OF REGENCIES/CITIES IN SOUTH SUMATRA PROVINCE**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN
LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA
SELATAN**

Gracika Janice Valencia^{1*}, Anggeraini Oktarida², Choiruddin³
Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan^{1,2,3}
gracikavalencia01@gmail.com¹, anggeraini_oktarida@polsri.ac.id²
choiruddin@polsri.ac.id³

ABSTRACT

This study investigates the influence of audit opinion, audit findings, audit delay, and independence ratio on the level of financial statement disclosure among regency/city governments in South Sumatra Province. Transparency in public financial management is essential for ensuring government accountability, where financial reports serve as a primary tool for fiscal communication to the public. The research addresses the issue of variation in LKPD disclosure levels across regions, suspected to be influenced by audit quality, timeliness, and fiscal capacity. The objective is to test both the partial and simultaneous effects of these four variables on disclosure level. A quantitative approach is employed using a descriptive method and panel data regression analysis processed with EViews. The sample includes 17 local governments over the 2021–2023 period, yielding 51 observations. The results reveal that, partially, audit opinion and audit delay have significant effects on financial disclosure levels, while audit findings and independence ratio do not. Simultaneously, all four variables show a significant influence. The findings conclude that improving audit opinion quality and reporting timeliness is essential to promote fiscal transparency. Local governments are expected to enhance internal control and reporting efficiency to optimize their financial disclosure levels.

Keywords: *Audit Opinion; Audit Findings; Audit Delay; Independence Ratio; Financial Statement Disclosure*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh opini audit, temuan audit, audit delay, dan rasio kemandirian terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik merupakan elemen kunci dalam menciptakan akuntabilitas pemerintahan daerah, di mana laporan keuangan berperan sebagai media utama komunikasi fiskal kepada publik. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah variasi tingkat pengungkapan LKPD antar daerah, yang diduga dipengaruhi oleh kualitas audit, ketepatan waktu pelaporan, serta kapasitas fiskal daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara parsial dan simultan pengaruh keempat variabel terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan teknik analisis regresi data panel yang diolah menggunakan EViews. Sampel mencakup 17 pemerintah daerah selama periode 2021–2023 dengan total 51 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, opini audit dan audit delay berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan, sedangkan temuan audit dan rasio kemandirian tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Secara simultan, keempat variabel berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Temuan ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas opini audit dan ketepatan waktu pelaporan sangat penting dalam mendorong transparansi fiskal. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan efisiensi pelaporan dan pengendalian internal agar tingkat pengungkapan laporan keuangan semakin optimal.

Kata Kunci: Opini Audit; Temuan Audit; Audit Delay; Rasio Kemandirian; Pengungkapan Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan instrumen penting dalam menciptakan

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Di tengah upaya reformasi birokrasi dan desentralisasi fiskal di Indonesia, publik

menaruh perhatian besar pada sejauh mana pemerintah daerah menyampaikan informasi keuangan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. LKPD yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga menjadi dasar evaluasi kinerja fiskal daerah. Tingkat pengungkapan informasi dalam LKPD mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip good governance dan pelayanan publik yang berkualitas.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan LKPD. Di antaranya adalah opini audit, temuan audit, audit delay, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Opini audit yang baik, khususnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), seringkali dikaitkan dengan laporan yang disusun secara transparan dan akuntabel. Temuan audit mencerminkan kelemahan sistem pengendalian dan ketidakpatuhan yang berpotensi menurunkan kualitas pengungkapan. Audit delay mengindikasikan ketidakefisienan pelaporan dan dapat mengurangi relevansi informasi. Sementara itu, rasio kemandirian fiskal mencerminkan kapasitas daerah dalam mendanai kebijakan secara otonom, yang berkorelasi dengan motivasi untuk menyajikan laporan secara terbuka.

Meskipun sejumlah metode seperti regresi linier berganda, data panel, serta analisis statistik deskriptif telah digunakan secara luas, terdapat kelemahan metodologis yang sering dijumpai. Beberapa penelitian menggunakan pendekatan cross-section yang tidak mempertimbangkan dinamika waktu, atau hanya menelaah sebagian dari variabel-variabel kunci secara terpisah, sehingga memberikan

gambaran parsial terhadap pengaruh simultan faktor-faktor tersebut terhadap pengungkapan LKPD. Selain itu, cakupan wilayah penelitian sering kali terbatas pada provinsi besar seperti Jawa Barat atau Sumatera Barat, tanpa mempertimbangkan karakteristik fiskal dan kelembagaan daerah lain seperti Sumatera Selatan yang memiliki tingkat heterogenitas pengelolaan keuangan yang tinggi.

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai masih bervariasinya tingkat pengungkapan LKPD antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Variasi ini tidak hanya menunjukkan perbedaan dalam kualitas tata kelola keuangan, tetapi juga mengindikasikan adanya pengaruh dari karakteristik audit dan kapasitas fiskal daerah yang belum tergambarkan secara utuh dalam studi terdahulu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan keempat variabel utama opini audit, temuan audit, audit delay, dan rasio kemandirian dalam satu model regresi panel untuk memperoleh gambaran simultan pengaruhnya terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan regresi data panel fixed-effect model untuk menganalisis hubungan kausal antara variabel-variabel tersebut. Model ini dipilih karena mampu mengontrol heterogenitas antar daerah dan memperhitungkan dinamika waktu dalam periode 2021–2023, yang terdiri atas 17 pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga menghasilkan total 51 observasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan mampu menangkap kompleksitas hubungan simultan antar variabel yang selama ini belum sepenuhnya terungkap melalui pendekatan cross-section biasa.

Kontribusi utama dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, memperluas cakupan wilayah studi pada konteks Sumatera Selatan yang belum banyak dikaji sebelumnya. Kedua, menyajikan integrasi keempat variabel audit dan fiskal dalam satu model simultan yang komprehensif. Ketiga, menawarkan rekomendasi berbasis bukti kepada pemerintah daerah terkait pentingnya kualitas audit dan efisiensi pelaporan sebagai upaya peningkatan transparansi. Keempat, menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan studi pengungkapan keuangan sektor publik dengan pendekatan data panel.

Struktur isi makalah ini terdiri atas lima bagian utama. Bagian pertama adalah pendahuluan yang memaparkan latar belakang, rumusan masalah, dan kontribusi penelitian. Bagian kedua membahas kajian pustaka dan pengembangan hipotesis. Bagian ketiga menjelaskan metode penelitian, termasuk populasi, sampel, dan teknik analisis data. Bagian keempat menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Bagian kelima memuat simpulan dan saran untuk penelitian lanjutan serta implikasi kebijakan.

2. Kajian Pustaka atau Penelitian Terkait

2.1 Teori Stewardship dan Transparansi Laporan Keuangan

Penelitian ini berpijak pada teori stewardship, yang memandang bahwa manajer atau pihak pengelola bertindak sebagai pelayan kepercayaan (steward) dari pemilik sumber daya atau publik [14]. Dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah, pejabat publik diposisikan sebagai steward yang memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk mengelola serta melaporkan dana publik secara transparan dan akuntabel. Teori ini

menekankan pentingnya kepercayaan dan integritas dalam hubungan antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai steward.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu instrumen utama yang mencerminkan sejauh mana tanggung jawab ini dijalankan. LKPD yang informatif dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi indikator keberhasilan tata kelola fiskal. Penelitian Syafaah (2023) menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang menjalankan prinsip stewardship dengan baik cenderung memiliki tingkat pengungkapan yang tinggi. Hal ini diperkuat oleh studi Aliyah (2024), yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik dan pelaporan keuangan berkorelasi positif terhadap kepercayaan masyarakat.

Namun, meskipun kerangka hukum seperti PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 telah mengatur prinsip transparansi secara normatif, pelaksanaannya masih bervariasi antar daerah. Faktor-faktor internal dan eksternal seperti kualitas audit, ketepatan waktu pelaporan, dan kapasitas fiskal daerah sering kali menjadi determinan perbedaan tingkat pengungkapan.

2.2 Variabel Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Beberapa variabel telah diidentifikasi sebagai faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan LKPD, di antaranya adalah opini audit, temuan audit, audit delay, dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Opini Audit

Opini audit merupakan hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sering dikaitkan

dengan kualitas laporan keuangan yang tinggi. Putra dan Marlina (2022) menunjukkan bahwa opini WTP berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan. Namun, Nadila dan Hardiningsih (2023) menemukan bahwa beberapa daerah tetap memiliki pengungkapan rendah meskipun memperoleh opini WTP, sehingga opini audit tidak selalu menjadi indikator mutlak transparansi.

Temuan Audit.

Temuan audit mencerminkan adanya kelemahan sistem pengendalian, ketidakpatuhan hukum, atau penyimpangan anggaran. Zahrul dan Andra (2020) menyebutkan bahwa temuan audit memicu tambahan pengungkapan sebagai bentuk koreksi dan klarifikasi. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Tiara dan Mardeyuzza (2023), yang menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan di Provinsi Sumatera Barat.

Audit Delay.

Audit delay adalah selisih waktu antara akhir tahun anggaran dan tanggal penyampaian laporan audit. Penelitian oleh Sari dan Maulani (2023) membuktikan bahwa audit delay berpengaruh negatif terhadap pengungkapan karena mengurangi relevansi dan kredibilitas laporan keuangan. Semakin cepat audit selesai, semakin tinggi kemungkinan laporan tersebut dipublikasikan secara transparan.

Rasio Kemandirian.

Rasio kemandirian keuangan daerah mencerminkan sejauh mana daerah mampu membiayai kegiatannya tanpa ketergantungan pada dana pusat. Menurut Lestari et al. (2023), rasio ini berkorelasi positif terhadap

pengungkapan karena daerah yang mandiri lebih bertanggung jawab terhadap dana publik. Namun, penelitian Utami dan Sulardi (2020) menyebutkan bahwa rasio kemandirian tidak memiliki pengaruh signifikan, menandakan bahwa faktor lain seperti budaya organisasi dan sistem pelaporan mungkin lebih dominan.

Kelemahan umum dari penelitian terdahulu adalah terbatasnya pendekatan simultan. Sebagian besar studi hanya meneliti satu atau dua variabel, atau menggunakan metode cross-section yang tidak menangkap perubahan antar waktu. Penelitian ini menawarkan pendekatan alternatif dengan menggunakan analisis regresi data panel untuk menguji keempat variabel tersebut secara bersamaan selama tiga tahun observasi (2021–2023) pada 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi empiris dan metodologis dalam memahami determinan tingkat pengungkapan LKPD di daerah dengan karakteristik fiskal yang beragam.

3. Metode yang Diusulkan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis regresi data panel untuk menguji pengaruh opini audit, temuan audit, audit delay, dan rasio kemandirian terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Data diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan LKPD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2021–2023.

3.1. Prosedur Analisis

Metode ini terdiri dari beberapa tahap, mulai dari pengumpulan data hingga pengujian hipotesis. Setiap langkah digambarkan melalui algoritma dan diagram alir agar memudahkan pemahaman.

Algorithm 1. Prosedur Analisis Regresi Data Panel

INPUT: Data sekunder dari BPK RI (opini audit, temuan audit, audit delay, rasio kemandirian)

OUTPUT: Hasil estimasi pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan

1: Step 1. Menentukan populasi dan sampel yaitu seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan (17 daerah) selama 3 tahun (2021–2023), menghasilkan 51 observasi.

2: Step 2. Mengumpulkan data laporan keuangan dan LHP dari portal e-PPID BPK RI dan situs resmi pemerintah daerah.

3: Step 3. Mengkodekan variabel sebagai berikut:

- Tingkat pengungkapan (Y): Skor pengungkapan CaLK berdasarkan item SAP;

- Opini audit (X1): Dikodekan ordinal (WTP = 3; WDP = 2; TMP = 1);

- Temuan audit (X2): Jumlah temuan BPK;

- Audit delay (X3): Jumlah hari dari 31 Desember ke tanggal LHP;

- Rasio kemandirian (X4): PAD dibagi Total Pendapatan Daerah;

4: Step 4. Menjalankan analisis regresi data panel dengan uji Chow, Hausman, dan LM untuk menentukan model terbaik (Common Effect, Fixed Effect, atau Random Effect).

5: Step 5. Menginterpretasi hasil regresi: nilai koefisien, signifikansi, dan pengaruh parsial maupun simultan

6: Step 6. Menyusun simpulan dan saran berdasarkan hasil uji hipotesis.

3.1.1. Komponen Penyusunan

Variabel

Pengukuran masing-masing variabel dilakukan berdasarkan kriteria yang telah terstandarisasi dalam literatur sebelumnya. Berikut daftar berpoin untuk klasifikasi:

1. Pengungkapan LKPD diukur berdasarkan jumlah item yang diungkap dari 49 item wajib dalam CaLK menurut SAP (Febrianti & Mahfud, 2022);
2. Opini audit diklasifikasikan secara ordinal (WTP, WDP, TMP);
3. Temuan audit adalah jumlah temuan yang tercantum dalam LHP BPK;
4. Audit delay adalah jumlah hari keterlambatan audit;
5. Rasio kemandirian adalah proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah.

Adapun prosedur penentuan model regresi dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Menjalankan uji Chow Test untuk memilih antara Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM);
2. Jika FEM terpilih, lanjutkan ke Hausman Test untuk memutuskan antara FEM atau Random Effect Model (REM);
3. Jika Common Effect Model terpilih, validasi dengan uji Lagrange Multiplier (LM Test) untuk mengecek kebutuhan efek acak.

Model regresi panel dalam penelitian ini ditulis dalam bentuk matematis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + \epsilon_{it}$$

Dimana :

Y_{it} = Tingkat pengungkapan LKPD pemerintah daerah ke-i pada waktu t

$X1_{it}$ = Opini Audit

$X2_{it}$ = Temuan Audit

$X3_{it}$ = Audit Delay

$X4_{it}$ = Rasio Kemandirian

ϵ_{it} = Error term

Model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai signifikansi (<0.05) dari uji t digunakan untuk melihat pengaruh parsial, sementara uji F digunakan untuk melihat pengaruh simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perangkat Lunak, Dataset, dan Analisis Awal

Penelitian ini menggunakan perangkat lunak EViews 12 sebagai alat bantu analisis regresi data panel, serta

Microsoft Excel untuk pengolahan awal dan rekoding data. Dataset diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah, yang diakses melalui situs e-PPID BPK dan portal resmi pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Sampel terdiri dari 17 kabupaten/kota selama periode 2021–2023, menghasilkan total 51 observasi.

Analisis awal dilakukan untuk mengevaluasi statistik deskriptif variabel, serta menguji asumsi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas sebelum menjalankan model regresi data panel. Statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
Tingkat Pengungkapan	51	71,43	95,92	84,36	6,78
Opini (ordinal) Audit	51	1	3	2,86	0,42
Temuan Audit	51	5	53	27,14	9,21
Audit Delay (hari)	51	74	134	97,35	11,78
Rasio Kemandirian	51	0,08	0,39	0,18	0,07

Dari Tabel 1 terlihat bahwa rata-rata tingkat pengungkapan LKPD cukup tinggi, yaitu 84,36%, dengan standar deviasi 6,78%. Sebagian besar daerah memperoleh opini audit mendekati WTP (kode 3), dengan variasi temuan audit yang cukup lebar, dari 5 hingga 53 temuan.

4.2. Uji Model dan Estimasi Regresi

Sebelum menentukan model regresi panel yang sesuai, dilakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM). Hasil ketiga pengujian tersebut ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Uji Pemilihan Model Panel

Uji	Nilai Statistik	Probabilitas	Keputusan
Chow Test	18,532	0,001	Gunakan Fixed Effect Model

Uji	Nilai Statistik	Probabilitas	Keputusan
Hausman Test	11,642	0,009	Gunakan Fixed Effect Model
Lagrange Multiplier Test	2,871	0,090	Tidak signifikan (diabaikan)

Hasil menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) adalah model terbaik untuk digunakan dalam analisis regresi selanjutnya.

4.3. Hasil Estimasi Regresi Panel (FEM)

Estimasi regresi menggunakan FEM disajikan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Regresi Data Panel dengan Fixed Effect Model

Variabel Independen	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
Opini Audit (X1)	2,584	1,045	2,473	0,017
Temuan Audit (X2)	0,024	0,031	0,774	0,443
Audit Delay (X3)	-0,152	0,063	-2,413	0,020
Rasio Kemandirian (X4)	0,837	2,273	0,368	0,715
R-squared	0,721			
F-statistik	6,882			0,000

Berdasarkan Tabel 3, opini audit berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan ($p = 0,017$), yang mendukung hipotesis awal bahwa opini WTP mendorong transparansi pelaporan. Audit delay menunjukkan pengaruh negatif signifikan ($p = 0,020$), sesuai dengan hipotesis bahwa keterlambatan audit menurunkan kualitas informasi yang diungkapkan. Sebaliknya, temuan audit dan rasio kemandirian tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan ($p > 0,05$), sehingga hipotesis terkait keduanya tidak didukung.

Nilai R-squared sebesar 0,721 menunjukkan bahwa keempat variabel independen mampu menjelaskan 72,1% variasi dalam tingkat pengungkapan. Uji F menunjukkan model secara keseluruhan signifikan pada tingkat 5% ($p = 0,000$).

4.4. Diskusi Temuan Penelitian

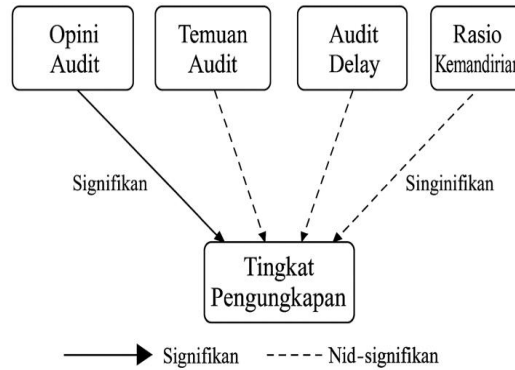
Hasil ini mendukung teori stewardship, di mana opini audit yang baik mendorong komitmen pengelolaan dana publik secara akuntabel. Pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP kemungkinan besar lebih siap membuka informasi kepada publik karena yakin bahwa laporan mereka telah memenuhi prinsip akuntansi yang benar.

Audit delay yang berpengaruh negatif memperkuat hasil penelitian Dewi dan Prasetyo (2022) [5], yang menyatakan bahwa keterlambatan pelaporan mencerminkan masalah teknis dan administratif yang berujung pada menurunnya kualitas informasi yang disampaikan. Ketidaksignifikan temuan audit dapat diinterpretasikan bahwa besarnya jumlah temuan tidak selalu mendorong pemerintah untuk

mengungkap lebih banyak, bahkan bisa jadi bersikap defensif [4].

Adapun rasio kemandirian yang tidak signifikan menunjukkan bahwa otonomi fiskal belum diiringi dengan peningkatan transparansi. Ini

mendukung pendapat Utami dan Sulardi (2020) [13], bahwa kapasitas fiskal bukan satu-satunya indikator perilaku pengungkapan, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor budaya organisasi dan tekanan politis.



Gambar 1. Diagram Pengaruh Variabel terhadap Tingkat Pengungkapan

5. Perbandingan

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan metodologis yang relevan dalam konteks transparansi keuangan daerah, terutama dengan pendekatan regresi data panel dan pemodelan simultan atas empat variabel utama yang belum banyak dikaji secara terintegrasi. Sebagian besar penelitian sebelumnya, seperti oleh Ramadhani dan

Lestari (2020) [6] serta Andini dan Heryanto (2023) [3], hanya menggunakan regresi linier berganda berbasis data cross-section, yang terbatas dalam menangkap variasi waktu dan entitas.

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara penelitian ini dan beberapa studi terkini:

Tabel 4. Perbandingan Penelitian Ini dengan Studi Terkini

Studi	Variabel Utama	Metode Analisis	Wilayah	Kelebihan / Kekurangan
Ramadhani & Lestari (2020)	Opini audit, audit delay	Regresi linier biasa	Jawa Barat	Tidak mempertimbangkan efek waktu
Zahrul & Andra (2020)	Temuan audit	Korelasi Pearson	Riau	Fokus sempit pada satu variabel
Tiara & Mardeyuza (2023)	Audit delay, rasio kemandirian	Panel, tapi terbatas	Sumatera Barat	Panel namun hanya 2 tahun observasi
Penelitian Ini (2025)	Opini audit, temuan, delay, kemandirian	Regresi data panel (FEM)	Sumatera Selatan	Integrasi 4 variabel, rentang waktu 3 tahun

Keunggulan utama penelitian ini terletak pada penggunaan Fixed Effect

Model (FEM) untuk mengatasi perbedaan karakteristik antar daerah

serta dinamika tahunan. Selain itu, wilayah penelitian di Provinsi Sumatera Selatan tergolong kurang terjelajahi dalam literatur keuangan sektor publik, padahal memiliki profil fiskal yang beragam dan tingkat opini audit yang fluktuatif.

Pendekatan ini juga relevan dengan tren teknologi e-audit dan open data yang sedang dikembangkan oleh BPK dan Kementerian Keuangan dalam mendukung keterbukaan informasi fiskal. Dengan meningkatnya digitalisasi pelaporan keuangan, model evaluasi seperti yang ditawarkan dalam studi ini akan semakin dibutuhkan untuk memantau kinerja pelaporan secara kuantitatif.

Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini tidak hanya mengisi gap akademik tetapi juga memberikan kerangka evaluatif yang dapat dimanfaatkan oleh auditor, pemerintah daerah, maupun pengambil kebijakan fiskal nasional dalam merancang sistem pelaporan dan pengungkapan keuangan yang lebih adaptif terhadap teknologi.

6. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini audit, temuan audit, audit delay, dan rasio kemandirian terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Melalui pendekatan regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM), ditemukan bahwa opini audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan, sementara audit delay berpengaruh negatif signifikan. Di sisi lain, temuan audit dan rasio kemandirian tidak menunjukkan pengaruh signifikan.

Temuan ini memperkuat teori stewardship yang menekankan pentingnya kepercayaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan publik. Pemerintah daerah yang memperoleh opini audit WTP cenderung memiliki komitmen lebih tinggi dalam mengungkapkan informasi keuangan secara transparan. Sebaliknya, keterlambatan audit mencerminkan masalah administratif yang dapat mereduksi kualitas pelaporan. Ketidaksignifikanan variabel temuan audit dan rasio kemandirian mengindikasikan perlunya evaluasi ulang terhadap kualitas internal kontrol dan budaya pelaporan fiskal.

Dari sisi kontribusi, penelitian ini memberikan wawasan baru dalam kajian pengungkapan keuangan sektor publik dengan pendekatan simultan atas empat variabel kunci yang sebelumnya banyak diteliti secara terpisah. Selain itu, fokus pada wilayah Sumatera Selatan memperluas cakupan literatur yang selama ini terpusat di daerah dengan tingkat fiskal lebih mapan. Penelitian ini juga mendukung praktik pengawasan berbasis data dalam era digitalisasi audit dan transparansi fiskal.

Adapun keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah jumlah tahun observasi yang masih terbatas (tiga tahun) dan belum mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kualitas SDM, sistem informasi keuangan, atau tekanan politik lokal. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan:

- Menambahkan variabel kontrol lain seperti ukuran pemerintah daerah, sistem akuntansi berbasis elektronik, atau indeks transparansi publik;
- Memperluas cakupan waktu untuk mendapatkan pola tren jangka panjang;
- Menggunakan pendekatan kuantitatif-kualitatif atau mixed methods untuk menggali persepsi aparatur pemerintah terhadap proses pelaporan dan audit.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi

empiris bagi pengambil kebijakan, auditor, dan akademisi dalam meningkatkan kualitas pengungkapan keuangan pemerintah daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. L. a. B. Wibowo, "Pengungkapan LKPD dalam Mendorong Transparansi Fiskal Daerah," *J. Tata Kelola Publik*, vol. 5, no. 1, pp. 12-25, 2023.
- [2] R. Binawati, "Peran Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Evaluasi Kinerja Fiskal Daerah," *J. Akuntansi Sektor Publik*, vol. 9, no. 2, pp. 67-78, 2022.
- [3] F. A. a. A. Heryanto, "Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD: Studi Empiris pada Pemerintah Daerah," *Jurnal Akuntansi dan Transparansi Publik*, vol. 8, no. 2, pp. 77-89, 2023.
- [4] M. Z. F. a. J. A. Asmara, "Penerimaan dari Pemerintah Pusat, Ukuran Legislatif, dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2015-2017.
- [5] M. A. D. a. D. Prasetyo, "Pengaruh Audit Delay terhadap Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia*, vol. 26, no. 1, pp. 12-21, 2022.
- [6] R. R. a. B. N. M. Lestari, "Analisis Rasio Kemandirian dan Implikasinya terhadap Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Keuangan Negara*, vol. 6, no. 3, pp. 88-99, 2023.
- [7] S. R. a. T. U. L. E. A. Putri, "Opini audit, dana perimbangan, kondisi keuangan dan pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah," *E Jurnal Akuntansi*, vol. 32, no. 8, pp. 2132-2141, 2022.
- [8] N. F. a. R. Y. M. Adinata, "Temuan Audit dan Dampaknya terhadap Kualitas LKPD: Studi Empiris Pemerintah Daerah," *Jurnal Audit Publik*, vol. 11, no. 1, pp. 33-46, 2023.
- [9] N. S. a. R. Maulani, "Audit Delay dan Pengungkapan Laporan Keuangan: Bukti dari Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, vol. 15, no. 1, pp. 66-76, 2023.
- [10] N. F. a. M. K. Mahfud, "Pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah," *Jurnal Akuntansi Publik Indonesia*, vol. 5, no. 1, pp. 44-58, 2022. [11] A. C. a. T. Handayani, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Transparansi Laporan Keuangan," *Jurnal Ilmu Akuntansi Indonesia*, vol. 6, no. 1, pp. 23-35, 2019. [12] F. T. a. R. Mardeyuzza, "Audit Delay dan Rasio Kemandirian sebagai Determinan Kualitas Pengungkapan LKPD," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, vol. 7, no. 2, pp. 89-101, 2023.
- [13] N. U. a. S. Sulardi, "Pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Keuangan Negara*, vol. 4, no. 1, pp. 32-42, 2020.
- [14] L. D. a. J. Davis, "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns," *Australia Jurnal Management*, vol. 16, no. 1, pp. 49-64, 1991.

- [15] D. N. a. P. Hardiningsih, "Apakah Opini Audit Mendorong Transparansi? Studi Empiris pada Laporan Keuangan Daerah," *J. Keu. & Akunt. Publik.*, vol. 10, no. 1, pp. 55-68, 2023.